



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 013.05.2.409212/2023**



DS:0704-1157-0029-8054

Revisi ke 01

Tanggal : 02 Februari 2023

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
3. Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
4. Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
- Sebesar : Rp. 783.658.000 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.05.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
013.05.BF.5252 Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

	Jumlah Uang
Rp.	783.658.000
Rp.	783.658.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 783.658.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN P A L U (051) Rp. 783.658.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 1

Program	: 013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	783.658.000
Kegiatan	: 5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	783.658.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	
	: 2. 01	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	
	: 3. 01	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	
	: 4. 01	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	
	: 5. 01	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	
	: 6. 01	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	
	: 7. 01	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
	: 8. 01	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	
	: 9. 02	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	
	: 10. 02	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	
	: 11. 02	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	
	: 12. 02	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	
	: 13. 02	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	
	: 14. 02	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	
	: 15. 02	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	
	: 16. 03	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	
	: 17. 03	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	
	: 18. 03	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	
	: 19. 03	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	
	: 20. 03	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	
	: 21. 03	persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	
	: 22. 04	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : I A. 2

Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

- 23. 04 Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
- 24. 04 Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
- 25. 04 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas
- 26. 05 Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
- 27. 05 Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 28. 06 Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- 29. 06 Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
- 30. 07 Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- 31. 07 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
- 32. 08 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Klasifikasi Rincian Output	1	:	5252.AEA	Koordinasi	10,00	kegiatan	297.084.000	
Rincian Output		:	01	AEA.001	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Fungsi Pemasarakatan di Wilayah	10.00	kegiatan	297.084.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	60,00	orang	280.422.000	
Rincian Output		:	01	AEF.001	Pembinaan Layanan Pemasarakatan di Wilayah	60.00	orang	280.422.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	12,00	operasi, Hari Operasi	206.152.000	
Rincian Output		:	01	BHB.001	Operasi Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah	12.00	operasi	206.152.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

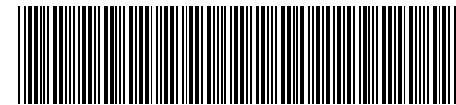
ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023

I B. SUMBER DANA



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasyarakatan
 Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
 Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	783.658.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	783.658.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
409212	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	-	783.658	-	-	-	783.658		
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	783.658	-	-	-	783.658		
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	-	783.658	-	-	-	783.658		
5252.AEA	Koordinasi (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	297.084	-	-	-	297.084	18 . 51	
01	RM	-	297.084	-	-	-	297.084	051	
5252.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	280.422	-	-	-	280.422	18 . 51	
01	RM	-	280.422	-	-	-	280.422	051	
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan (18.51 SULAWESI TENGAH / KOTA PALU)	-	206.152	-	-	-	206.152	18 . 51	
01	RM	-	206.152	-	-	-	206.152	051	
JUMLAH		-	783.658	-	-	-	783.658		

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (05) Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : (18) SULAWESI TENGAH
Kode>Nama Satker : (409212) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

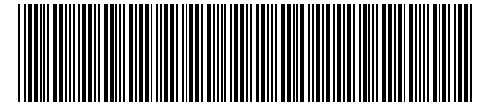
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	409212	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	195.331	10.303	83.131	66.853	36.233	44.394	54.573	166.123	90.584	36.133	0	783.658
		BELANJA BARANG	0	195.331	10.303	83.131	66.853	36.233	44.394	54.573	166.123	90.584	36.133	0	783.658
	013.05.BF.5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	0	195.331	10.303	83.131	66.853	36.233	44.394	54.573	166.123	90.584	36.133	0	783.658
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	195.331	10.303	83.131	66.853	36.233	44.394	54.573	166.123	90.584	36.133	0	783.658

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
IV A. B L O K I R**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409212] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 013.05.2.409212/2023
IV B. C A T A T A N**



DS:0704-1157-0029-8054

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [05] Ditjen Pemasarakatan
Provinsi : [18] SULAWESI TENGAH
Kode dan Nama Satker : [409212] KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Pemasarakatan

ttd.
Reynhard Silitonga
NRP 67090332